

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah : profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “*good governance*” adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahannya.

## 1.2 GAMBARAN KONDISI ORGANISASI

Untuk mendukung tugas pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitas. Data SDM ASN Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

Tabel 1. Data ASN Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2024

No.	Gol/Runag	Jumlah	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
2.	IV/b	3	-	-	-	-	1	2
3.	IV/a	2	-	-	-	-	-	2
4..	III/d	23	-	-	2	-	16	5
5.	III/c	6	-	-	2	-	4	-
6.	III/b	9	-	-	4	4	1	-
7.	III/a	3	-	-	-	-	3	-
8..	II/d	6	-	-	6	-	-	-
9.	II/c	5	-	-	5	-	-	-
10.	II/b	1	-	-	1	-	-	-
11.	II/a	1	-	-	1	-	-	-
12.	I/d	2	-	-	2	-	-	-
13.	I/c	0	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah total</b>		<b>62</b>			<b>23</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>10</b>

### **1.2.1 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, mempunyai 6 (Enam) unit UPTD yaitu ;

1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
2. UPTD Perikanan Perairan Umum;
3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
5. UPTD Pasar Hewan; dan
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

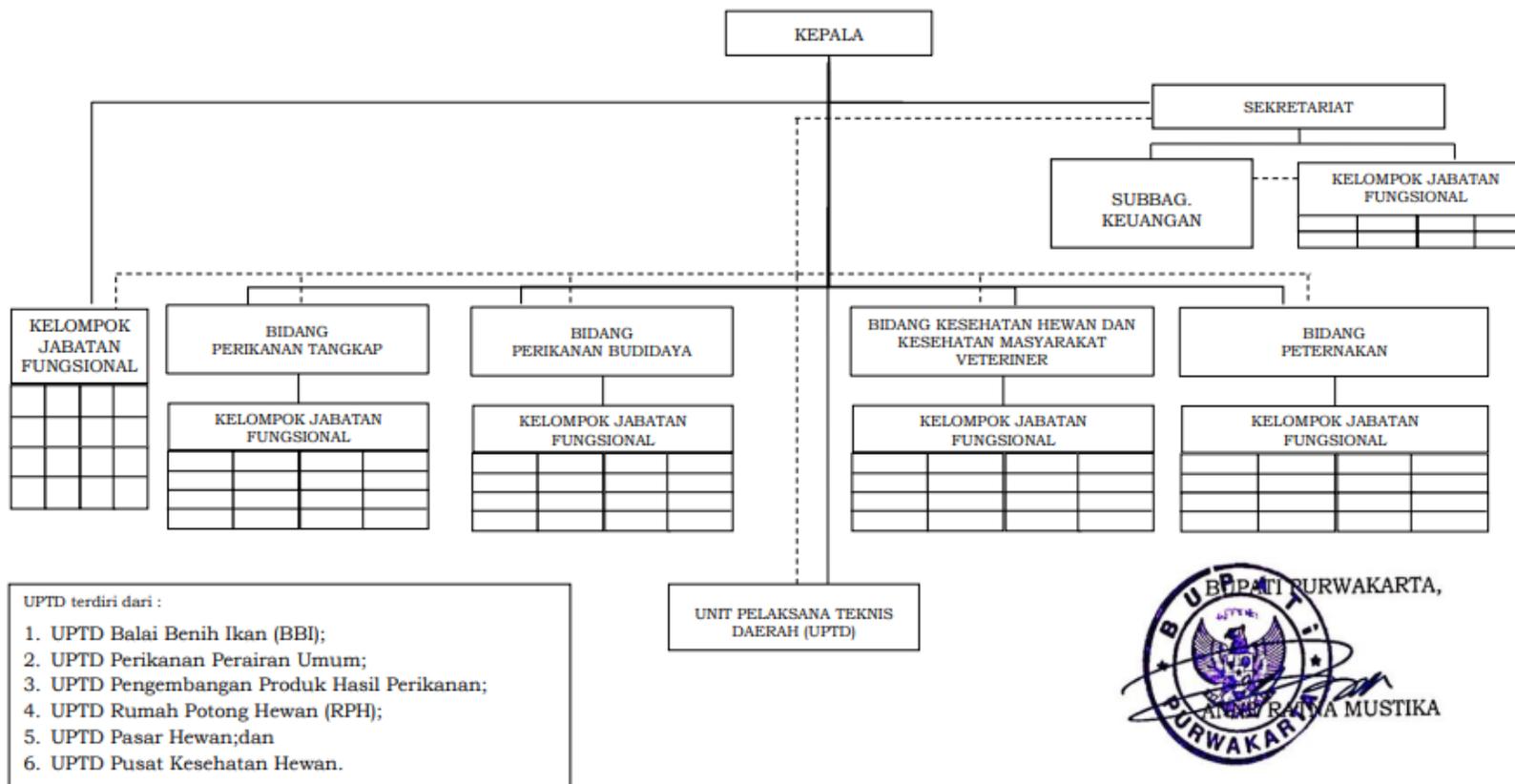
Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan, Dinas Perikanan Dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perikanan Dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya

Secara terstruktur dapat diperlihatkan **Struktur Organisasi** Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai berikut :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 47 NOMOR 2023  
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 47 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

UPTD Kelas A Terdiri dari:

1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI);
2. UPTD Perikanan Perairan Umum;
3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
4. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
5. UPTD Pasar Hewan; dan
6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan.



#### **1.4 RUANG LINGKUP.**

Ruang lingkup Penyusunan Cascading Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2024 adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Eselon IV dilingkup Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta,.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Peternakan, yang tercantum didalam RPJMD serta RENSTRA Perubahan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2024-2026.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Tahun 2024 terdiri dari :

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Kondisi Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Ruang Lingkup

#### **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
- 2.3 Cascading Kinerja

#### **BAB III Penutup**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS (2024-2026)**

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LAKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 telah dirumuskan pada awal tahun 2024, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Adapun ruang lingkup substansi pokok/Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 tersebut, adalah sebagai berikut:

### **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan**

Kedudukan Sektor Perikanan dan Peternakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta sangat strategis, yaitu Mewujudkan perekonomian rakyat yang berbasis desa. Untuk mencapai misi tersebut dan untuk memberi pedoman dan arah pembangunan perikanan dan peternakan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok	Fungsi
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah	1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;.
	2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
	3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;
	4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan
	5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD adalah sebagai berikut.

a. Tujuan ;

Tujuan 1, Meningkatkan produksi dan usaha

Tujuan 2, Meningkatkan produksi peternakan

Tujuan 3, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,  
Bersih, Efektif dan Akuntabel

b. Sasaran ;

Sasaran 1.1. Meningkatnya produksi perikanan

Sasaran 1.2. Meningkatnya usaha perikanan

Sasaran 2.1. Meningkatnya produksi peternakan

Sasaran 2.2. Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan  
Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi  
ketentraman dan kenyamanan masyarakat

Sasaran 3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan  
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah melalui penerapan SPBE.

Tabel 11. Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2024 – 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2024	Program
1	2	3	4
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (5,25%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</li> </ul>
2.	Meningkatnya usaha perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan (0,33%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>
3.	Meningkatnya produksi peternakan	Pertumbuhan Produksi Peternakan (1,55%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>• Program Penyuluhan Pertanian</li> </ul>
4.	Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Kasus penyakit hewan menular : 0 kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan</li> </ul>
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	Capain SAKIP, Peringkat : BB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>

## 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam

mencapai Tujuan dan Sasaran. Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

**Strategi dan Kebijakan Umum** Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok, Fungsi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan dan Peternakan.

<b>Tugas Pokok :</b>	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.		
<b>Fungsi :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan;</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.</li> <li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.</li> <li>4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya</li> </ol>		
<b>VISI : MEWUJUDKAN PURWAKARTA INSTIMEWA</b>			
<b>MISI 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.	1. Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran	Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern		
<b>MISI 4 : Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa</b>			
1. Meningkatkan penyediaan pangan asal hewan dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya perikanan dan peternakan	1. Meningkatkan penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan hewani dengan penyebaran dan pengembangan ikan dan ternak kepada masyarakat	1. Meningkatkan populasi, produksi dan konsumsi hasil perikanan dan peternakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan yang produktif, mandiri, berdaya saing, bernilai tambah dan ramah lingkungan	1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan peternakan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas benih ikan	1. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan
		2. Meningkatkan sarana perikanan tangkap dan restocking di perairan umum	2. Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap dengan menerapkan <i>Culture Base Fisheries</i>
		3. Meningkatkan kualitas mutu bibit dan produktivitas ternak	3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) melalui pengembangan wilayah sumber bibit dan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB), serta penerapan teknologi peternakan melalui Inseminasi Buatan dan Embrio Transfer
	2. Meningkatnya pengelolaan kawasan budidaya ikan di perairan umum	1. Mengelola kawasan budidaya dan perairan umum	1. Pengembangan kawasan budidaya dan perairan umum yang ramah lingkungan
	3. Berkembangnya kelompok/kelembagaan perikanan dan peternakan	1. Membina usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan	1. Peningkatan produk pengolahan hasil perikanan dan peternakan dan penguatan daya saing produk perikanan dan peternakan
			2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
3. Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran hasil peternakan			
4. Pengembangan SDM dan Kelembagaan perikanan dan peternakan yang berwawasan agribisnis			
3. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat veteriner	1. Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis dan <i>zoonosis</i> (PHMSZ)	1. Pencegahan, penanggulangan pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan Strategis dan <i>Zoonosis</i> (PHMSZ), penanggulangan Gangguan Reproduksi (Ganrep) pada ternak serta menjamin keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan, Peningkatan status kesehatan hewan (Keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet), Pengawasan lalulintas ternak, pengamatan penyakit hewan dan surveilance, pengawasan peredaran obat hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan mewujudkan keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)

### **2.3 CASCADING KINERJA**

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV. Adapun **Rincian Perjanjian Kinerja** atau **Cascading Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024** dapat dilihat pada **Lampiran**.

### **BAB III PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari **Cascading Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024** dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Cascading Kinerja ini adalah untuk memberikan **gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Pemerintah bagi Pejabat Eselon** yg ada dilingkup Dinas Perikanan dan Peternakan yg mengindikasikan *tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan* sesuai dengan Program dan Kebijakan yg ditetapkan.

Demikian Cascading Kinerja ini dibuat semoga bermamfaat, kritikan dan saran yg disampaikan sebagai masukan untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yg telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga **Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta** dapat menyusun **Cascading Tahun 2024**, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yg bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang **LAKIP** (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Cascading Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 merupakan Sarana Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yg menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yg *transparant* dan *akuntabel*, *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata Cascading ini diharapkan akan mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan guna mengantisipasi dan menjawab tantangan Dinamika Pembangunan Perikanan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK** dan **Isu Global** yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Purwakarta,

2024

Kepala Dinas  
Perikanan Dan Peternakan  
Kabupaten Purwakarta



Dra. Hj. SITI IDA HAMIDAH, MM  
NIP. 1968062819932007

## D A F T A R    I S I

<b>BAB</b>	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Gambaran Kondisi Organisasi.....	3
1.3    Struktur Organisasi .....	4
1.4    Ruang Lingkup .....	8
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1    Rencana Strategis .....	9
2.2    Strategi dan Arah Kebijakan Umum.....	13
2.3    Cascading Kinerja.....	16
<b>BAB III    PENUTUP .....</b>	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>18</b>

# CASCADING KINERJA

**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
JL. SURADIREJA NO. 28 TELP. 200221 PURWAKARTA**

**LAMPIRAN1. CASCADING KINERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2024**

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
								2024	2025	2026		
1	4	5	9	10	11	12	13	18	19	20	26	28
<b>III.</b>											Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
<b>III.1</b>	<b>Tujuan : 1. Meningkatkan produksi dan usaha perikanan</b>					Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	5,25	5,25	5,25	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
						Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	Persen	0,33	0,33	0,33		Kepala Dinas
<b>III.1.4</b>		<b>Sasaran : 1.1. Meningkatnya produksi perikanan</b>				Persentase peningkatan usaha perikanan	Persen				Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
<b>3.25.03</b>		<b>Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>									Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
						Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.635,30	1.692,54	1.751,77	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
						Produksi perikanan	Persen	5,25	5,25	5,25	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
						Konsumsi ikan	Persen	30	35	35	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
						Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	18,97	19,67	20,31	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
						Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	3,32	3,40	3,48	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
						Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	76,85	79,54	82,33	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
						Produksi Perikanan Tangkap	Persen	3,50	3,50	3,50	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
<b>3.25.03.2.01</b>				<b>Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten Kota</b>								
						Jumlah pengelolaan ikan yang dapat diusahakan	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
<b>3.25.03.2.01.0001</b>				<b>Subkegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Pemberdayaan Nelayan Kecil

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.03.2.01.0002					<b>Subkegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Pemberdayaan Nelayan Kecil
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	22,00	32,00	42,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.03.2.01.0003					<b>Subkegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Pemberdayaan Nelayan Kecil
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	1.868,00	2.668,00	3.468,00	Kelautan Dan Perikanan	
<b>3.25.03.2.02</b>				<b>Kegiatan : Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah pemberdayaan nelayan kecil	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.03.2.02.0001					<b>Subkegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	150,00	180,00	210,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.03.2.02.0002					<b>Subkegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	25,00	30,00	35,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.03.2.02.0003					<b>Subkegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit/Usaha	10,00	13,00	16,00	Kelautan Dan Perikanan	

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
3.25.04			<b>Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>									Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
						Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	ton	16.351,74	17.496,36	18.721.11	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	
						Poduksi Ikan Konsumsi	ton	17.987,00	19.189,00	20.473,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	
						Produksi Benih Ikan UPR	Ekor	1.078.038.512,00	1.088.818.897,00	1.100.000.000,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	
						Produksi Benih Ikan BBI	Ekor	20.260,00	20.462,00	20.667,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	
						Produksi Ikan Hias	Ekor	608.990,00	627.259,00	646.076,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	
						Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita	36,00	37,00	38,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	
						Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	Persen	130	133	136	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	
3.25.04.2.02			<b>Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>									Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan	Kelompok	60,00	66,00	75,00	Kelautan Dan Perikanan		
3.25.04.2.02.0001			<b>Subkegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil</b>									Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Usaha
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	5,00	5,00	5,00	Kelautan Dan Perikanan		
3.25.04.2.02.0002			<b>Subkegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>									Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Usaha
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan	Kelompok	20,00	24,00	30,00	Kelautan Dan Perikanan		
3.25.04.2.02.0003			<b>Subkegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</b>									Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Usaha

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRA M	KEGIATA N	SUBKEGIAT AN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
						Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	35,00	37,00	40,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.04.2.02.0004						<b>Subkegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Usaha
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	28,00	30,00	32,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.04.2.04						<b>Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>					Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah pengelolaan pembudidayaan ikan	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.04.2.04.0001						<b>Subkegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Produksi Perikanan
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.04.2.04.0002						<b>Subkegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Usaha
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	24,00	28,00	32,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.04.2.04.0003						<b>Subkegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Usaha
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6,00	8,00	10,00	Kelautan Dan Perikanan	

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
3.25.04.2.04.0004					<b>Subkegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Usaha
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.04.2.04.0005					<b>Subkegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Usaha
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	50,00	50,00	50,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.04.2.04.0006					<b>Subkegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Kelembagaan Usaha
						Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	4,00	4,00	4,00	Kelautan Dan Perikanan	
<b>3.25.05</b>			<b>Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</b>								Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Perikanan Perairan Umum
						Jumlah pengawaan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya yang diawasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Perikanan Perairan Umum
						Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Perikanan Perairan Umum

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
3.25.05.2.01				<b>Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>							Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air Lainnya yang dapat diusahakan	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.05.2.01.0001				<b>Subkegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</b>							Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Perikanan Perairan Umum
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.05.2.01.0002				<b>Subkegiatan : Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</b>							Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Perikanan Perairan Umum
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakandalam Kabupaten /Kota	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
		<b>Sasaran : 1.2. Meningkatnya usaha perikanan</b>				Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan	Persen	0,33	0,33	0,33	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
3.25.06			<b>Program : Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>								Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan
						Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	400,00	500,00	550,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan
						Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Ikan	Kelompok	14,00	15,00	16,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTRA	PROGRA M	KEGIATA N	SUBKEGIAT AN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
						Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Unit	130,00	140,00	150,00	Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan	
<b>3.25.06.2.01</b>				<b>Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>								Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokum en	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan		
3.25.06.201.0001				<b>Subkegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan	
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokum en	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan		
<b>3.25.06.2.02</b>				<b>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>								Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran	Lapora n	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan		
3.25.06.2.02.0001				<b>Subkegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>							Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan	
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	130,00	140,00	150,00	Kelautan Dan Perikanan		

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
3.25.06.2.03				Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri ikan	Ton	400,00	500,00	600,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.06.2.03.0001				Subkegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	400,00	500,00	600,00	Kelautan Dan Perikanan	
3.25.06.2.03.0002				Subkegiatan : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							Kelautan Dan Perikanan	Kepala UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	130,00	140,00	150,00	Kelautan Dan Perikanan	
	Tujuan : 2. Meningkatkan produksi peternakan					Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,50	1,50	1,50	Pertanian	Kepala Dinas
		Sasaran : 2.1. Meningkatnya produksi peternakan						1,50	1,50	1,50	Pertanian	Kepala Dinas
3.27.02			Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								Pertanian	Kepala Bidang Peternakan
						Pertumbuhan Produksi Peternakan	Persen	1,50	1,50	1,50	Pertanian	Kepala Bidang Peternakan
						Cakupan Akseptor IB	Persen	75,00	80,00	85,00	Pertanian	Kepala Bidang Peternakan
						Persentase bibit ternak bersertifikat	Persen	10,00	13,00	15,00	Pertanian	Kepala Bidang Peternakan
						Persentase Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Persen	2,00	2,50	3,00	Pertanian	Kepala Bidang Peternakan

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
3.27.02.2.01				<b>Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>							Pertanian	
						Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.02.2.01				<b>Subkegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</b>							Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Bina Usaha Peternakan
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.02.2.02				<b>Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							Pertanian	
						Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.02.2.02.0002				<b>Subkegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</b>							Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Perbibitan
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.02.2.03				<b>Kegiatan : Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							Pertanian	
						Jumlah peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.02.2.03.0001				<b>Subkegiatan : Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak</b>							Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Sarana, Prasarana dan Pakan Ternak
						Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.02.2.04				<b>Kegiatan : Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer Kabupaten/Kota</b>							Pertanian	
						Jumlah pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
3.27.02.2.04.0001						<b>Subkegiatan : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat
						Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
<b>3.27.02.2.05</b>						<b>Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					Pertanian	
						Jumlah pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.02.2.05.0007						<b>Subkegiatan : Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Perbibitan
						Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Ekor	55	60	65	Pertanian	
3.27.02.2.05.0008						<b>Subkegiatan : Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Perbibitan
						Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	60,00	70,00	80,00	Pertanian	
<b>3.27.02.2.06</b>						<b>Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>					Pertanian	
						Jumlah penyediaan benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.02.2.06.0002						<b>Subkegiatan : Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Sarana, Prasarana dan Pakan Ternak
						Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Ton	2,00	2,00	2,00	Pertanian	
3.27.02.2.06.0004						<b>Subkegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Perbibitan

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
						Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Ekor	365	365	365	Pertanian		
3.27.03			<b>Program : Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>									Pertanian	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan
						Persentase RPH sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	Pertanian	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	
3.27.03.2.01			<b>Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian</b>									Pertanian	
						Jumlah pembangunan prasarana pertanian	Unit	1,00	1,00	1,00	Pertanian		
3.27.03.2.01.0015			<b>Subkegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan</b>									Pertanian	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan
						Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta beroperasi	Unit	1,00	1,00	1,00	Pertanian		
3.27.07			<b>Program : Penyuluhan Pertanian</b>									Pertanian	Kepala Bidang Peternakan
						Cakupan bina kelompok petani (peternakan)	Persen	16,00	12,00	12,00	Pertanian	Kepala Bidang Peternakan	
3.27.07.2.01			<b>Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>									Pertanian	
						Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian		
3.27.07.2.01.0001			<b>Subkegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</b>									Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Bina Usaha Peternakan
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	4,00	8,00	10,00	Pertanian		
3.27.07.2.01.0002			<b>Subkegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</b>									Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Bina Usaha Peternakan

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2,00	2,00	2,00	Pertanian	
3.27.07.2.01.0003						<b>Subkegiatan : Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Bina Usaha Peternakan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	2,00	2,00	2,00	Pertanian	
		<b>Sasaran : 2.2. Terciptanya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang kondusif bagi ketentraman dan kenyamanan masyarakat</b>				Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	kasus	0,00	0,00	0,00	Pertanian	Kepala Dinas
3.27.04			<b>Program : Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>								Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
						Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,00	0,00	0,00	Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
						Persentase Ternak Yang Divaksin Dari Populasi Wajib Suntik	Persen	70,00	70,00	70,00	Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
						Kejadian Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	Kasus	0,00	0,00	0,00	Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
						Jumlah Lokasi Penanganan Penyakit Hewan	Lokasi	17,00	17,00	17,00	Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
						Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (Lalu Lintas Ternak)	Ekor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
						Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Asal Hewan/Hasil Produk Asal Hewan (PAH/HPAH)	Persen	79,00	84,00	87,50	Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
						Produk Hasil Ternak Berupa Daging Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	828,00	908,00	992,00	Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
						Produk Hasil Ternak Berupa Telur Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Ton	16,20	18,00	19,80	Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
						Produk Hasil Ternak Berupa Susu Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS)	Liter	38,80	41,00	42,70	Pertanian	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner
<b>3.27.04.2.01</b>						<b>Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>					Pertanian	
						Jumlah Wilayah pengendalian, penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis serta wilayah pembebasan penyakit hewan menular	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.04.2.01.0003						<b>Subkegiatan : Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
						Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.04.2.01.0005						<b>Subkegiatan : Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat
						Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	5,00	5,00	5,00	Pertanian	
3.27.04.2.01.0008						<b>Subkegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTRA	PROGRA M	KEGIATA N	SUBKEGIAT AN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
3.27.04.2.02						<b>Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>					Pertanian	
						Jumlah pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	Lapora n	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.04.2.02.0004						<b>Subkegiatan : Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)</b>					Pertanian	UPTD Pasar Hewan
						Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Lapora n	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.04.2.02.0006						<b>Subkegiatan : Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
						Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Lapora n	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.04.2.02.0007						<b>Sub Kegiatan : Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya</b>						
						Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Lapora n	1,00	1,00	1,00	0	Sub Koordinator Sub Subtansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
3.27.04.2.03						<b>Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					Pertanian	
						Jumlah pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	Lapora n	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.04.2.03.0001						<b>Subkegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Hewan</b>					Pertanian	UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
						Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Lapora n	1,00	1,00	1,00	Pertanian	

KODE	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
3.27.04.2.03.0002						<b>Subkegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Kabupaten/Kota</b>				Pertanian	UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)	
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12,00	12,00	12,00	Pertanian	
3.27.04.2.04						<b>Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>				Pertanian		
						Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.04.2.04.0002						<b>Subkegiatan : Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</b>				Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.04.2.04.0004						<b>Subkegiatan : Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>				Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Pertanian	
3.27.04.2.04.0008						<b>Subkegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan</b>				Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	50,00	60,00	70,00	Pertanian	
3.27.04.2.04.0010						<b>Sub Kegiatan : Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan</b>				Pertanian		
						Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha				Pertanian	
3.27.04.2.05						<b>Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>				Pertanian		
						Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	Laporan	1,00	1,00	1,00	Pertanian	

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
3.27.04.2.05.0003					<b>Subkegiatan : Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha</b>					Pertanian	Sub Koordinator Sub Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit					
<b>V.1</b>	<b>Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel</b>									Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat				Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
<b>V.1.1</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.</b>									Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
<b>3.25.01</b>			<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>							Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas	
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	Kelautan Dan Perikanan	Kepala Dinas
				<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						Kelautan Dan Perikanan		
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	10,00	10,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan		
					<b>Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan		
					<b>Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	2,00	Kelautan Dan Perikanan		
					<b>Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	2,00	Kelautan Dan Perikanan		
					<b>Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	2,00	2,00	Kelautan Dan Perikanan		

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
					<b>Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>							Kelautan Dan Perikanan	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>						Kelautan Dan Perikanan	Kasubag Keuangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12,00	12,00	12,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>						Kelautan Dan Perikanan	Kasubag Keuangan
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>						Kelautan Dan Perikanan	Kasubag Keuangan
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	

KODE	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
				<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Subkegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Subkegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Subkegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							Kelautan Dan Perikanan	
						Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum

KODE	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Bahan/Material</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>						Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
					<b>Subkegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						Kelautan Dan Perikanan		
						Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Unit	13,00	13,00	13,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3,00	4,00	4,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Pengadaan Mebel</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	
						Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	10,00	10,00	10,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	2,00	2,00	2,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
				<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						Kelautan Dan Perikanan		
						Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA			BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan		
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan		
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	1,00	Kelautan Dan Perikanan		
				<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							Kelautan Dan Perikanan		
						Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Unit	87,00	87,00	87,00	Kelautan Dan Perikanan		
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	6,00	6,00	6,00	Kelautan Dan Perikanan		
					<b>Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	70,00	70,00	70,00	Kelautan Dan Perikanan		
					<b>Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>							Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5,00	5,00	5,00	Kelautan Dan Perikanan		

KODE	TUJUAN RENSTR A	SASARAN RENSTR A	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA		BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
					<b>Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	unit	6,00	6,00	6,00	Kelautan Dan Perikanan	
					<b>Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya</b>					Kelautan Dan Perikanan	Sub Koordinator Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6,00	6,00	6,00	Kelautan Dan Perikanan	

